

BAB 1

PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1979 yang pada mulanya dinamakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Keluarga Berencana yang diarahkan untuk meningkatkan peran serta ibu rumah tangga/isteri dalam mengisi waktu luangnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kegiatan ini diikuti para peserta KB khususnya ibu-ibu rumah tangga/ istri dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga

Selanjutnya sesuai dengan banyaknya keinginan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki kelompok usaha tersebut dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat, maka pada tahun 1993 istilah UPPKA disesuaikan oleh BKKBN menjadi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). (BKKBN, 1995).

Untuk mendukung suksesnya program UPPKS, pemerintah melalui berbagai program membantu mencarikan modal yang bersifat hibah maupun pinjaman dengan bunga lunak antara lain : Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA), kredit modal dari Badan Usaha Milik Negara (PT. POSINDO, PT. Kimia Farma, PT. PLN dan Bank Pemerintah), Kredit Penggalangan

Kemitraan Usaha (KPKU), dan Kredit Penerapan Tehnologi Tepat Guna (KPTTG) Taskin. . Modal yang disalurkan kepada kelompok UPPKS untuk tahun 2004 sebanyak Rp. 251.680.275.621. kepada 596.916 kelompok UPPKS di seluruh pelosok desa/kelurahan.(BKKBN, 2004).

Jumlah kelompok yang besar tersebut masih dalam tahap kuantitas artinya masih banyak persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara khusus, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan IPB dan BKKBN tahun 1999 terdapat kelompok UPPKS di beberapa Propinsi Jawa Barat , Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara ditemui kendala antara lain : tingkat pendidikan pengurus/anggota kelompok yang rendah, pengetahuan perbankan yang kurang, memiliki jenis usaha kecil yang tradisional dan beragam, pengetahuan tentang pengusaha mitra yang kurang, dan belum ada wadah yang mempertemukan pengusaha mitra dan kelompok. Kendala lain yang dihadapi berdasarkan temuan penelitian ini adalah belum siapnya kelompok ini menerima modal usaha, dan pembentukan kelompok belum melibatkan tokoh masyarakat sehingga kesannya jalan sendiri. Disamping masih dirasakan tidak terprogramnya pembinaan yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pembina dari kelompok ini sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil survei sementara dari BKKBN kota Medan, dari 1.887 kelompok UPPKS dengan jumlah anggota 37.740, setiap kelompok terdiri dari 10 sampai dengan 20 anggota keluarga baik yang memiliki bidang usaha produktif maupun yang tidak memiliki usaha ekonomi produktif, bergabung

bersama-sama mengembangkan bidang usaha yang ada dalam kelompok UPPKS , dengan komposisi pengurus terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara, dengan tingkatan/ strata adalah : 136 kelompok paripurna, 541 kelompok berkembang dan dasar 1210 kelompok dengan jenis usaha : home industri, pedagang, dan mengerjakan makanan ringan. dengan modal bersumber dari Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kelompok Hidup Perkembangan Anak (KHPA), serta Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) dengan jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 3.330.087.000,- yang tersebar kepada 1.887 kelompok yang terdiri dari 37.720 anggota keluarga. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk usaha masing-masing dan ada juga yang tergabung dengan usaha bersama dalam kelompok. Kemudian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan bantuan yang dimaksud di kembalikan kepada pengurus kelompok untuk disampaikan ke Bank.

Adapun produksi kelompok UPPKS dipasarkan dilingkungan anggota di Kota Medan dan sebagian lagi dipasarkan kedaerah lain di Sumatera Utara. Didalam pelaksanaannya juga mengalami berbagai kendala yang dihadapi diantaranya kualitas UPPKS tidak sanggup bersaing dengan pengusaha kecil dan menengah, hal ini disebabkan karena adanya tingkat pendidikan pengurus kelompok sehingga tidak mampu bersaing dari segi kualitas produksi, hasil

produksi tidak dapat dipasarkan secara *continue*, belum dapatnya kelompok UPPKS ini berkembang sebagai pemrakarsa dan pelaksana pembangunan bagi anggotanya sendiri, karena belum atau baru sebatas mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dilain pihak semakin melemahnya motivasi dan kinerja dari PLKB dalam pembinaannya baik teknis maupun non teknis, hal ini ditandai dengan tidak terprogramnya pembinaan yang dilakukan dalam kelompok, pengembalian dana yang tidak tepat waktu dari setiap kelompok UPPKS yang menjadi tanggung jawab binaannya, serta seabrek persoalan lainnya.

Mencermati persoalan-persoalan di atas, terlihat bahwa secara umum bahwa UPPKS beserta sistem dan mekanisme didalamnya yang bertujuan memberi modal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota peserta KB tidak dapat memenuhi harapan BKKBN.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hubungan motivasi dan kinerja PLKB terhadap keberhasilan UPPKS Kota Medan.

B. Identifikasi Masalah

UPPKS merupakan "*asset*" yang sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan dari peserta KB dan menjadi perhatian yang serius BKKBN sebagai pengelolanya. Sebagai asset UPPKS memiliki peran strategis karena merupakan salah satu komponen pendukung dalam setiap rencana yang

ditetapkan BKKBN. Dengan demikian harus diperhatikan pelaksanaan dan kedudukannya lebih-lebih dalam kaitan peningkatan kesejahteraan peserta KB. Dalam kaitan keberhasilan UPPKS ini, cukup banyak faktor yang dianggap mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi keberhasilan UPPKS adalah : (1) Pengetahuan Manajemen, (2) Budaya organisasi, (3) Pendidikan dan Pengalaman Kerja, (4) Gaya Kepemimpinan, (5) Kemampuan manajerial pimpinan, (6) Kemampuan komunikasi penugasan, (7) Motivasi, (8) Aktualisasi diri, (9) Insentif atau gaji, (10) Kinerja, dan (11) Hubungan interpersonal.

C. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan peneliti dan luasnya permasalahan serta untuk memungkinkan pengelolaan penelitian dengan baik, maka permasalahan penelitian ini dibagi kepada tiga aspek pokok saja yakni : (1) motivasi sebagai variabel bebas pertama (X_1), Kinerja sebagai variabel bebas kedua (X_2), dan Keberhasilan kelompok UPPKS Kota Medan sebagai variabel terikat (Y).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan variabel penelitian, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah motivasi PLKB berkorelasi signifikan dengan keberhasilan kelompok UPPKS Kota Medan ?

2. Apakah kinerja PLKB berkorelasi signifikan dengan keberhasilan kelompok UPPKS Kota Medan ?
3. Apakah motivasi dan kinerja PLKB secara bersama-sama berkorelasi signifikan dengan keberhasilan kelompok UPPKS Kota Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui tingkat korelasi motivasi PLKB dengan keberhasilan kelompok UPPKS Kota Medan.
2. Mengetahui tingkat korelasi kinerja PLKB dengan keberhasilan kelompok UPPKS Kota Medan.
3. Mengetahui tingkat korelasi motivasi dan kinerja PLKB secara bersama-sama berkorelasi signifikan dengan keberhasilan kelompok UPPKS Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan kepada Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara tentang Motivasi dan Kinerja yang telah dilakukan PLKB dalam memberhasilkan kegiatan UPPKS.

2. Dasar pertimbangan dan rekomendasi kepada Badan Keluarga Berencana (Badan KB) Kota Medan tentang Motivasi dan Kinerja yang harus dilakukan PLKB untuk masa mendatang.
3. Bahan informasi dan masukan bagi peneliti dalam meningkatkan ilmu Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
4. Menambah wawasan Penulis dalam aplikasi keilmuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

THE
Character Building
UNIVERSITY